



**BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Buton adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2016 sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 6 Februari 2016

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Peraturan Bupati Buton**Nomor : 6 Tahun 2016****Tanggal : 8 Februari 2016****Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	73,51	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A (%)	1,00	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (%)	1,00	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD (%)	98,56	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A (%)	99,86	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,23	Dinas Pendidikan
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	96,85	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/paket B (%)	0,99	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP (%)	94,93	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%)	1,00	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/paket B (%)	98,99	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)	0,55	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/paket C (%)	0,99	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA (%)	82,43	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK (%)	0,99	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / SMK / MA / paket C (%)	98,99	Dinas Pendidikan
	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,95	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,41	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	77,74	Dinas Pendidikan
	Angka melek huruf (%)	95,8	Dinas Pendidikan
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	52,62	Dinas Pendidikan
	Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	7,43	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga	Jumlah organisasi kepemudaan	44	Dinas Pendidikan
	Jumlah kegiatan Kepemudaan	65	Dinas Pendidikan
	Persentase peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya narkoba(%)	0,40	Dinas Pendidikan
Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	22.196	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Persentase desa/kel memiliki rumah baca (%)	5	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase pengembangan obat tradisional pada puskesmas terpilih (%)	35	Dinas Kesehatan
	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 KH)	980	Dinas Kesehatan
	Meningkatkan usia harapan hidup(UHH) (Thn)	72	Dinas Kesehatan
	Penulisan resep obat generik (%)	100	Dinas Kesehatan
	Rasio posyandu persatuan balita (per 1000 balita)	13,5	Dinas Kesehatan
	Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%)	65	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif (%)	75	Dinas Kesehatan
	Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita (%)	<15	Dinas Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemberian MP- ASI anak 6-24 bulan dari keluarga miskin (%)	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas(%)	68	Dinas Kesehatan

1	2	3	4
	Persentase Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) (%)	35	Dinas Kesehatan
	Prevalensi TBC (per 100.000 penduduk)	220	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA positif (%)	86	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (ICU) (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita pneumonia balita (%)	70	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare (%)	92	Dinas Kesehatan
	Annual Parasite Incidence (API) Per 1.000 Penduduk	< 1,0	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan (%)	93	Dinas Kesehatan
	AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun (per100.000 penduduk)	< 5	Dinas Kesehatan
	Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) <24 jam (%)	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan dokumen profil kesehatan (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	1,3	Dinas Kesehatan
	cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin (%)	35	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk (per 30.000 penduduk)	3,8	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk (per10.000 penduduk)	2,5	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas (%)	160	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas pembantu (%)	26,7	Dinas Kesehatan
	Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat (%)	98	Dinas Kesehatan

1	2	3	4
	Puskesmas dengan fasilitas PONED (%)	23	Dinas Kesehatan
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk (per150.000 penduduk)	0,6	Dinas Kesehatan
	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk (per100.000 penduduk)	15	Dinas Kesehatan
	Rasio Bidan terhadap jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	75	Dinas Kesehatan
	Rasio Perawat terhadap jumlah penduduk (per 100.000 penduduk)	135	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA/1.000 KH) (per 1.000 KH)	17	Dinas Kesehatan
	Cakupan yankes balita (%)	86	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (%)	74	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	93	Dinas Kesehatan
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	80	Dinas Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	89	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan nifas (%)	92	Dinas Kesehatan
	Cakupan neonatus resti/komplikasi yang tertangani (%)	88	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan Neonatal lengkap (KN3) (%)	90	Dinas Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi (%)	92	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian bayi (AKB/1.000 KH) (per 1.000 KH)	20	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH) (per 1.000 KH)	98	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian neonatal per 100.000 KH	17	Dinas Kesehatan
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkatnya (%)	96	Dinas Kesehatan
	Adanya standar operasional prosedur (SOP) (Ada/tidak ada)	Ada	RSUD
	Angka penggunaan tempat tidur / bed occupancy rate (BOR)(%)	50	RSUD
	Angka rata-rata lama perawatan atau length of stay (LOS)(Hari)	6	RSUD

1	2	3	4
	Angka selang waktu antara penggunaan tempat tidur atau Turn over internal (TOI)(Hari)	6	RSUD
	Frekwensi pemakaian tempat tidur atau Bed Turn Over Internal (BTO) (kali)	29	RSUD
	Angka kematian netto (Net death rate/ NDR) (%)	1	RSUD
	Angka kematian umum gross death rate (GDR) (%)	1	RSUD
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (Menit)	≤ 7	RSUD
	Kepuasan pasien di UGD (%)	≥ 70	RSUD
	Waktu tunggu rawat jalan (menit)	≤ 60	RSUD
	Kepuasan pasien di poliklinik (%)	≥ 90	RSUD
	Kejadian infeksi pasca operasi (%)	≤ 1,5	RSUD
	Kejadian infeksi nosokomial (%)	≤ 9	RSUD
	Kepuasan pasien di rawat inap (%)	≥ 90	RSUD
	Kejadian kematian di meja operasi (%)	≤ 1	RSUD
	Kepuasan pelanggan di bedah sentral (%)	≥ 80	RSUD
	Kematian ibu karena persalinan :		
	a. Perdarahan (%)	≤ 1	RSUD
	b. Pre eklamsia (%)	≤ 30	RSUD
	c. Sepsis (%)	≤ 0,2	RSUD
	Kepuasan pasien di persalinan dan perinatalogi (%)	≥ 80	RSUD
	Kejadian infeksi nosokomial (%)	≤ 9,2	RSUD
	Kepuasan pelanggan (%)	≥ 70	RSUD
	Kerusakan foto (%)	≤ 2	RSUD
	Kepuasan pelanggan di radiologi (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan di pelayanan patologi klinik (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan (%)	≥ 80	RSUD
	Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi (jumlah)	24	RSUD
	Ketersediaan formularium (dokumen) (ada/tidak ada)	Ada	RSUD
	Waktu tunggu pelayanan obat jadi (menit)	≤ 60	RSUD

1	2	3	4
	Waktu tunggu pelayanan obat racikan (menit)	≤ 60	RSUD
	Kepuasan pelanggan di Apotik (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan pelayanan gizi (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan (%)	≥ 80	RSUD
	Kepuasan pelanggan di rekam medik (%)	≥ 80	RSUD
	Baku mutu limbah cair		
	a. BOD (mg/l)	30	RSUD
	b. COD (mg/l)	80	RSUD
	c. TSS (mg/l)	30	RSUD
	d. PH	6 - 9	RSUD
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance (menit)	≤ 30	RSUD
	Dokter pemberi pelayanan kesehatan	100	RSUD
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Rasio tempat ibadah (Mesjid) (Buah)	474	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah (Gereja) (Buah)	6	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah (Pura) (Buah)	5	Sekretariat Daerah
Menurunnya jumlah masalah Kesejahteraan Sosial	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	62,0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah anak terlantar yang dibina (Orang)	70	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kualitas sumberdaya perempuan dan kesetaraan gender	Jumlah persentase pengusaha perempuan dan laki-laki per tahun	20,05	BKKBD dan PP
	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda (orang)	198	BKKBD dan PP
	Proporsi lurah / kepala desa perempuan (orang)	13	BKKBD dan PP
	persentase perempuan sebagai pengurus partai politik (%)	4	BKKBD dan PP
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Jumlah)	2.914	BKKBD dan PP

1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas hidup anak	Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak anak per tahun (keg.)	3	BKKBD dan PP
	Jumlah peraturan / ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup anak (perda)	1	BKKBD dan PP
Meningkatnya Kualitas SDM melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Jumlah persentase peserta KB pria per tahun (%)	18	BKKBD dan PP
	Persentase peserta KB perempuan dibanding laki-laki (%)	350	BKKBD dan PP
	Prevalensi peserta KB aktif (%)	74	BKKBD dan PP
	Prevalensi penggunaan kontrasepsi (%)**	76	BKKBD dan PP
	Pelayanan antenatal setidaknya sekali kunjungan (org)	50	BKKBD dan PP
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (%)	51	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tersedianya lokasi pemukiman transmigrasi baru (PTB)	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kota/jumlah penduduk (%)	29	Dinas Pekerjaan Umum
	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik (%)	63,27	Dinas Pekerjaan Umum
	Jembatan dalam kondisi baik (M')	850	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan Air (minimal 1,5 M) (%)	4,2	Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	66,40	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

1	2	3	4
Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen RDTR (Dok)	3	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen RTBL (Dok)	2	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,05	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD (ada/tdk)	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Sarana Prasarana Pertanian	Rasio panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	0,61	Dinas Pekerjaan Umum
	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	61	Dinas Pekerjaan Umum
	cakupan pelayanan irigasi yang teraliri sawah (Ha)	1778	Dinas Pekerjaan Umum
Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	75	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	80,2	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Rumah Tangga mendapat aliran listrik (%)	63	Dinas Pertambangan dan Energi
	Persentase rumah layak huni	95	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah angkutan darat (jumlah angkutan)	2221	Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan (%)	100	Dinas Perhubungan
	Uji KIR Angkutan Umum (Jumlah)	1.226	Dinas Perhubungan
	Panjang jalan yang dilayani angkutan umum (%)	87,25	Dinas Perhubungan
	Persentase kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan (%)	80	Dinas Perhubungan

1	2	3	4
Meningkatnya / Terciptanya pemanfaatan ruang yang baik	Persentase ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan perkotaan (%)	33,39	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan penanganan persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	60	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
	Persentase tingkat penanganan generasi sampah terhadap jumlah penduduk kota/perkotaan dan kualitas penanganan (%)	60	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
	Persentase jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan (100%) (%)	78	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
	Tingkat timbunan sampah (m ³ /org/hr)	0,0027	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Meningkatnya pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase pengungsi yang ditangani	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase rumah tangga yang tinggal dikawasan rawan bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran (%)	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana alam (%)	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya pengelolaan potensi SDA secara lestari	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) (%)	22,3	Dinas Kehutanan
	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) (%)	0,007	Dinas Kehutanan
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (Rp)	398.148	Dinas Kehutanan
	Tingkat kualitas air minum (%)	90	Badan Lingkungan Hidup
	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	Badan Lingkungan Hidup

1	2	3	4
	Terpantaunya kualitas air sungai dan laut sesuai standar (%)	100	Badan Lingkungan Hidup
	Cakupan penyelenggaraan Sistem Informasi Lingkungan	100	Badan Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan pencegahan Air	100	Badan Lingkungan Hidup
	Cakupan pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup (%)	100	Badan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	4,3	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Konsumsi ikan (%)	84,81	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	401,01	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UMKM	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	260	Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan perkembangan keanggotaan (jumlah absolut dan jumlah relatif) (%)	13,14	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase perbandingan antara jumlah pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi koperasi dengan jumlah koperasi pada suatu wilayah (%)	10	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase pembentukan koperasi baru (%)	15	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase Koperasi aktif (%)	98	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase peningkatan SHU (%)	30	Dinas Koperasi dan UKM

1	2	3	4
Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Regulasi Ketahanan Pangan (ada/tdk)	Ada	Dinas Pertanian
	Ketersediaan pangan utama (Ton)	480,06	Dinas Pertanian
	Regulasi ketahanan pangan (ada/tdk)	Ada	BP4K2P
	Ketersediaan pangan utama (Ton)	480,06	BP4K2P
	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar	38,63	Dinas Pertanian
	Jumlah dan kualitas penyuluh (%)	41	Dinas Pertanian
	Jumlah dan kualitas penyuluh (%)	41	BP4K2P
	Produksi daging ternak (Kg)	347.001	Dinas Pertanian
	Produksi peternakan (ekor/tahun)	88%	Dinas Pertanian
	Jumlah dan kemampuan Kelompok Tani (Klp)	200	BP4K2P
Meningkatnya Pengelolaan Potensi Mineral dan Air	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	13,5	Dinas Pertambangan dan Energi
	Pertambangan tanpa ijin (Ha)	13	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif	Rasio desa berlistrik (%)	81	Dinas Pertambangan dan Energi
	Lama rata-rata listrik menyala (jam/hari)	19,50	Dinas Pertambangan dan Energi
	Rasio elektrifikasi (%)	66	Dinas Pertambangan dan Energi

1	2	3	4
Meningkatnya industri perdagangan usaha industri kreatif	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	20.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM produktif (%)	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase jumlah IKM yang dibina (%)	21,74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)	112.710,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Presentase Sengketa Perdagangan yang diselesaikan (%)	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Rp)	320,263,22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Tingkat ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder sarana niaga (unit)	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya jumlah investasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Lama Proses Perizinan (hari)	1	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan (%)	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
Meningkatnya Kepariwisataa Daerah	Persentase promosi budaya Untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik (%)	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kunjungan wisatawan (Jumlah)	1000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah Destinasi pariwisata unggulan yang dikelola (buah)	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase sarana pada obyek wisata (%)	35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1	2	3	4
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase ikon buton yang berbasis budaya (%)	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	40,91	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan (jumlah lembaga adat)	243	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Mengoptimalkan fungsi Baruga/Balai Pertemuan (kec)	7	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase LMP berprestasi (%)	16	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase peran masyarakat dalam pembangunan (%)	9	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase keterlibatan pemerintah dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan (%)	5	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Jumlah LSM (LSM)	40	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase PKK aktif (%)	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase Posyandu aktif (%)	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1	2	3	4
Meningkatnya Poleksosbud Kamtibnas Perlindungan Serta Kedisiplinan Masyarakat	Rasio bangunan Ber-IMB (%)	9,85	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan (%)	3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Persentase pengendalian tuntutan masyarakat melalui unjuk rasa (per tahun)	10/10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Angka kriminalitas (%)*	87	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Jumlah PKL yang tertata (jumlah PKL)	750	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase peningkatan stabilitas daerah atas kerja sama dengan aparat pengamanan (KOMINDA) (%)	76	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Jumlah Orang Asing yang terpantau (orang)	2.702	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	22	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (%)	50	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Peningkatan pemahaman antar Pengurus Parpol (orang)	7.267	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik

1	2	3	4
Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya) (%)	3,23	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
	Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan (%)	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
	Persentase kenaikan pangkat tepat waktu (%)	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
	Persentase pegawai sesuai kompetensi jabatan	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
	Persentase tingkat ketidakhadiran aparatur (%)	10	Sekretariat Daerah
	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran kedisiplinan pegawai (%)	100	Sekretariat Daerah
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (keg.)	1	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Persentase penyebaran informasi kearsipan (%)	100	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	39,04	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	38	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio efisiensi belanja (%)	15	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen regulasi pengelolaan keuangan	80	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen regulasi pengelolaan BMD*	75	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Meningkatnya PAD	25.494.571.979	Dinas Pendapatan Daerah
	Peningkatan proporsi PAD dibandingkan Total Pendapatan (%)	110	Dinas Pendapatan Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen regulasi pengelolaan BMD**	75	Kantor Pengelola Aset Daerah

1	2	3	4
	Raperda APBD tepat waktu (raperda)	1	Sekretariat Daerah
	Perda APBD tepat waktu (perda)	1	Sekretariat Daerah
	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (%)	80	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelayanan pemerintahan daerah	Persentase Kepemilikan KTP	79	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Penerapan KTP nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Sudah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga (%)	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	ketersediaan database skala provinsi	Ada	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Indeks kepuasan layanan masyarakat (ada/tdk)	ada	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang memiliki SPM (%)	86	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai Tupoksinya (%)	86	Sekretariat Daerah
	Luas lahan bersertifikat (%)	94	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian ijin lokasi (%)	3	Sekretariat Daerah
	Jumlah kerjasama yang ditandatangani (MOU)	4	Sekretariat Daerah
	Jumlah kerjasama yang ditandatangani (MOU)	4	Kantor Penghubung
	Jumlah kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah (jumlah KD)	4	Sekretariat Daerah
	Jumlah kerjasama yang ditandatangani (MOU)	474	Sekretariat Daerah

1	2	3	4
Meningkatnya pemenuhan Produk Hukum Daerah secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan daerah	Persentase Raperda yang menjadi Perda (%)	84	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Bupati yang diterbitkan(%)	85	Sekretariat Daerah
	Persentase Penerbitan SK Bupati (%)	82	Sekretariat Daerah
	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan dibanding Perda yang diajukan (%)	69	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum (kasus) (%)	25	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan hukum pada tingkat Kecamatan (Kec) (%)	24	Sekretariat Daerah
	Publikasi perundang- undangan melalui media elektronik (SJDIH) (%)	100	Sekretariat Daerah
	Tersedianya dokumentasi hukum (%)	100	Sekretariat Daerah
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian	Persentase pegawai yang telah menandatangani pakta integritas (%)	100	Inspektorat
	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP (%)	80/95	Inspektorat
Meningkatnya kualitas data dan informasi	Website milik pemerintah daerah (%)	86	Sekretariat Daerah
	Sistim Informasi Manajemen Pemda (buah)	25	Sekretariat Daerah
	Media Massa seperti majalah, radio dan televisi	7	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Buku "Kab/kota dalam angka" (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Buku "PDRB Kab/kota" (ada/tdk)	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya perencanaan pembangunan partisipatif	Persentase aparat Bappeda yang mengikuti pelatihan perencanaan (%)	70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI BUTON,

Ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN